

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK.....	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
D. Kerangka Konseptual.....	12
E. Kerangka Teori.....	16
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Penulisan	25
BAB II LANDASAN TEORI.....	28
A. Kepailitan	28
1. Pengertian Kepailitan	28
2. Dasar Hukum Kepailitan	25
3. Syarat-Syarat Kepailitan.....	32
4. Tata Cara Pengajuan Permohonan Pernyataan Pailit	43
5. Akibat Kepailitan	49
B. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)	52
1. Pihak Yang Berhak Mengajukan Permohonan PKPU	53
2. Permohonan PKPU Dan Permohonan Pernyataan Pailit	55

3. Prosedur Dan Tata Cara Permohonan PKPU	56
4. Jenis PKPU	58
5. Jenis kelalaian	59
6. Berakhirnya PKPU	60
C. Perdamaian dan Homologasi dalam PKPU	61
1. Perdamaian dalam PKPU	61
2. Homologasi dalam PKPU	65
3. Akibat Hukum Homologasi Bagi Para Pihak	66
4. Peninjauan Kembali	68
BAB III DATA HASIL PENELITIAN	69
A. Pembatalan Perdamaian (Homologasi)	69
B. Kajian Terhadap Permohonan Pembatalan Perdamaian (Homologasi)(Putusan Nomor 61/PK/Pdt.Sus-Pailit/2016)	75
1. Para Pihak	75
2. Pengadilan Niaga	75
3. Mahkamah Agung (Kasasi)	76
4. Mahkamah Agung (Peninjauan Kembali)	77
C. Kajian Terhadap Permohonan Pembatalan Perdamaian (Homologasi)(Putusan Nomor 1 PK/Pdt.Sus-Pailit/2020)	80
1. Para Pihak	80
2. Pengadilan Niaga	81
3. Mahkamah Agung (Kasasi)	82
4. Mahkamah Agung (Peninjauan Kembali)	83

D. Data Hasil Wawancara	86
BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN	90
A. Upaya Hukum Dalam Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sehubungan Dengan Adanya Tuntutan Pembatalan Perdamaian (Homologasi).....	90
1. Bentuk Upaya Hukum Dalam Perkara Kepailitan.....	91
1.1 Prosedur Mengajukan Upaya Hukum Dalam Perkara Kepailitan	96
2. Bentuk Upaya Hukum Terhadap Pernyataan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	103
3. Bentuk Upaya Hukum Terhadap Pernyataan Pailit Yang Berasal Dari Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	108
B. Analisis Hukum Pasal 295 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dikaitkan Dengan Pasal 171 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sehubungan Dengan Adanya Permohonan Peninjauan Kembali Terhadap Tuntutan Pembatalan Perdamaian (Homologasi)	117
1. Permohonan Peninjauan Kembali (PK) Dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran	117
2. Analisis Kasus Permohonan Peninjauan Kembali Terhadap Tuntutan Pembatalan Perdamaian (Homologasi)	129

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	171
A. Kesimpulan	171
B. Saran	173
DAFTAR PUSTAKA	174